



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 780/VII/2013

IV/JULI 2013



Buka Puasa Pimpinan DPR dan Presiden Dihadiri Imam Masjid Madinah

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JULI 2013

Minggu keempat bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 11 dan 12 Juli. Namun, untuk Laporan AKD minggu ini akan dilaporkan kegiatan pada Rapat Paripurna tanggal 11 Juli. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 11 Juli 2013

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa surat masuk, diantaranya dari Presiden perihal Permohonan Pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia dan dari BPK perihal permintaan perimbangan mengenai Badan Pemeriksa negara lain yang menelaah sistem pengendalian mutu BPK.

Rapat Paripurna 11 Juli ini memiliki 6 agenda: [1] Laporan komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Deputy Gubernur Bank Indonesia dan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016 dilanjutkan pengambilan keputusan; [2] laporan komisi I mengenai hasil pembahasan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016 dilanjutkan pengambilan keputusan; [3] pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Komisi IV tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU DPR; [4] pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR-RI tentang Advokat menjadi RUU DPR-RI; [5] pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tentang RUU Pendidikan Kedokteran; [6] pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara.

Untuk agenda [3], yaitu mengenai pendapat fraksi, Rapat paripurna menyetujui RUU inisiatif tentang perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU DPR. Pertimbangan yang diberikan DPR atas rencana perubahan UU ini, karena UU No. 18 tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



bangun hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah. Bahwa kenyataannya, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, belum memberikan hasil yang optimal, karena UU ini dimotivasi oleh pemanfaatan sumberdaya hewan, pada sub-sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa sandang, pangan dan energi. Beberapa pasal dalam UU No. 18 tahun 2009 telah dilakukan *judicial review* ke MK, yaitu terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap masukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertifikasi halal bagi hewan yang dipersyaratkan. Disamping putusan MK tersebut, sesuai dengan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat, substansi lain yang berkontribusi memberikan hasil yang belum optimal adalah penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pengeluaran hasil inseminasi buatan, pencegahan

penyakit hewan menular di dalam suatu wilayah dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan. Berdasarkan kondisi tersebut, DPR memandang perlu dilakukan penyesuaian perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Materi yang akan diatur dalam RUU perubahan ini, antara lain mengenai benih, bibit, dan bakal untuk tujuan pemurnian jenis hewan ternak tertentu dan untuk produksi serta ketentuannya dalam mengeluarkan hasil inseminasi buatan ke luar negeri, pencegahan, muncul, tersebar dan atau keluarnya penyakit hewan dan zoonosis yang terjadi dalam suatu wilayah ataupun antarwilayah. Peredaran produk hewan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal



bagi yang dipersyaratkan. RUU inisiatif Komisi IV akhirnya disetujui rapat Paripurna menjadi RUU DPR.

Agenda [4] RUU inisiatif bales tentang Advokat. RUU inisiatif ini dilatarbelakangi bahwa [1] Indonesia sebagai negara hukum, salah satu syaratnya adalah memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. [2] bahwa penegakan hukum dalam suatu negara hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menentukan, apakah suatu masyarakat akan tetap hidup dalam satu kesatuan tatanan sosial atau tercerai berai menuju kepunahan, karena konflik sosial yang berkepanjangan. Berkaitan dengan hal tersebut, peran dan keberadaan advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat berfungsi membela keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keadilan yang bebas dan mandiri. [3] selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat dalam jalur profesi diluar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan, pada saat ini kian meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam menghadapi pergaulan antar bangsa yang makin terbuka. [4] UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah berlaku selama 9 tahun sejak disahkan oleh DPR bersama Pemerintah pada 5 april 2003. Namun dalam perjalanannya, implementasi UU ini menemui banyak permasalahan. Sejak disahkan tercatat ada 9 uji materi UU Advokat dilakukan di MK. Dua diantaranya dikabulkan.

Pertama berkaitan pasal 31, yang menyatakan bahwa UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK berikutnya terkait dengan permasalahan keberadaan organisasi advokat yang telah menimbulkan friksi antar advokat, baik secara organisasi maupun individu. Selain dua hal tersebut, permasalahan lain yang timbul antara lain ketentuan mengenai advokat yang diangkat menjadi pejabat negara, persyaratan pengangkatan advokat, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik, kewajiban memberikan jasa hukum cuma-cuma dan peranserta masyarakat.

Kerangka RUU ini: [1] mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; [2] meningkatkan partisipasi advokat dan masyarakat dalam penegakan hukum dan pemerintahan; [3] memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para advokat untuk berserikat dan berkumpul serta mewujudkan cita-cita organisasi advokat. [4] membentuk suatu sistem pembinaan advokat yang berkesinambungan demi peningkatan kualitas profesi advokat.

Dalam laporannya, ketua Bales mengatakan bahwa dengan RUU ini menjadikan pengaturan dan landasan hukum bagi advokat lebih implementatif sehingga mampu menye-

lesaikan permasalahan yang ada dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat tidak mampu dalam mencari keadilan dan buta hukum di tengah-tengah peradilan Indonesia yang belum dapat menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. RUU ini disetujui Rapat Paripurna menjadi RUU DPR.

Agenda [5] mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tentang RUU Pendidikan Kedokteran. RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang dibahas selama tujuh kali masa sidang, mengandung berbagai substansi yang sangat urgen, strategis dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran. RUU ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum untuk mengatasi dan mengatur berbagai problem yang terkait dengan proses seleksi, proses belajar-mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta alat-alat laboratorium, tenaga pendidikan, dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran. Dalam UU ini diatur adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi dokter yang setara dengan program dokter spesialis.

Setelah UU ini diundangkan, komisi X DPR-RI akan menyampaikan beberapa terobosan dalam perbaikan pendidikan kedokteran dan beberapa materi substansi atau norma-norma yang akan diperoleh manfaatnya oleh masyarakat. antara lain berkaitan dengan seleksi penerimaan mahasiswa yang menjamin adanya kesempatan bagi calon daerah sesuai kebutuhan daerahnya, kesetaraan jender dan kondisi masyarakat yang berpengaruh rendah. Standar nasional pendidikan kedokteran ditetapkan oleh menteri. Dalam penyusunannya, standar pendidikan kedokteran mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang disusun secara bersama oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi rumah sakit pendidikan dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Uji kompetensi dilakukan sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter dan dokter gigi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi.

RUU ini terdiri dari 8 bab dan 64 pasal, dengan 3 pasal Ketentuan Peralihan dan 3 pasal Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan antara lain diatur, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada harus menyesuaikan ketentuan UU ini, paling lama 5 tahun sejak diundangkan. Program studi kedokteran dan studi kedokteran gigi yang sudah ada harus menyesuaikan diri paling lama 5 tahun sejak diundangkan.

Ketentuan penutup antara lain disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan UU ini. ketentuan peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

Agenda [6] pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara telah disetujui.**

Buka Puasa Pimpinan DPR dan Presiden Dihadiri Imam Masjid Madinah



Ketua DPR RI, Marzuki Alie Senin (15/7) didampingi Pimpinan DPR yang lain menggelar buka puasa bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra III No.10, Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono didampingi Herawati Boediono. Hadir pula Ketua MPR yang baru, Sidarto Danusubroto, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua DPD Irman Gusman, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar.

Presiden Yudhoyono tiba di kediaman Ketua DPR sekitar pukul 17.00 WIB, langsung disambut Marzuki Alie dan Ibu Asmawati Marzuki Alie beserta Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Sohibil Iman di gerbang kediaman rumah. Selang beberapa menit kemudian hadir Wakil Presiden Boediono beserta Ibu Herawati Boediono.

Sebelum memasuki ruang acara Buka Puasa bersama, Presiden dan Wakil Presiden istirahat sejenak di ruang tunggu utama. Beberapa menit sebelum acara berlangsung Presiden dan Wapres langsung menuju tempat acara.

Dalam sambutannya sebagai tuan rumah, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa buka puasa bersama merupakan sebuah tradisi baik yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya untuk menjalin silaturahmi antar Pemimpin Negara.

“Silaturahmi itu akan memperpanjang usia dan menambahkan rezeki dan Insya Allah barokah untuk kita semua, termasuk juga antar Pemimpin Negara dan Pemimpin DPR, semoga puasa kita diterima Allah SWT di bulan yang penuh ampunan ini,” kata Marzuki.

Menjelang berbuka puasa, Presiden, Wapres dan para undangan mendapat siraman tausiyah dari Imam Masjid Madinah, Arab Saudi, Syekh Ali Jaber. Dalam tausiyahnya yang bertajuk ‘Sisa Umur yang terbaik dan bermanfaat’ Imam Masjid Madinah itu memberikan motivasi kepada seluruh undangan yang hadir untuk mencintai dan menghafal Al Quran sebagai sebuah petunjuk jalan.

Beberapa menit kemudian, adzan Maghrib berkumandang, SBY dan Ibu Ani beserta para undangan langsung menikmati ta’jil untuk membatalkan puasa. Dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah dengan imam Syekh Saad Nomani. Acara ditutup dengan menikmati makan bersama seluruh undangan yang hadir.

Dijumpai sesaat sebelum berlang-

sungnya shalat Isya, Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengungkapkan alasan-mengundang Imam Masjid Nabawi memberikan ceramah Ramadhan.

“Saya sudah lama berkawan baik dengan Syekh Ali Jaber dan penceramah lainnya. Dan di acara khusus ini saya sengaja mengundang beliau untuk memberikan tausiyah. Karena saya menilai tausiyah Syekh Ali Jaber mendamaikan dan sangat menyejukkan hati, dan Indonesia sangat butuh figur pendakwah atau penceramah seperti itu,” ungkapnya. (Ayu)foto:wahyu/parle



Ketua MPR RI Sidarto Danubroto, Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi isteri dalam Buka Puasa Bersama di kediaman Ketua DPR.

Percepatan Penggantian Kapolri Tetap Harus Transparan dan Profesional

Komisi III DPR RI setuju usulan Presiden yang ingin mempercepat proses penggantian Kapolri. Diharapkan dalam satu dua bulan mendatang akan ditemukan satu nama untuk menggantikan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun pada 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III, Martin Hutabarat kepada Parle baru-baru ini. Menurut Martin, usulan percepatan penggantian Kapolri oleh Presiden itu bukan dilatarbelakangi adanya kerusuhan di beberapa wilayah termasuk di Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Namun konon, Presiden ingin Kapolri yang baru dapat segera menyiapkan pengamanan jelang pemilu 2014 mendatang.

“Wacana percepatan penggantian Kapolri sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada realisasinya. Hal itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Meski demikian ia berharap jika Presiden ingin mengganti kapolri, Presiden harus betul-betul transparan, dan orang yang akan dipilih harus orang yang benar-benar profesional, berkualitas,” ujar Martin.

Hal tersebut lanjut Martin, disebabkan



Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat

kan banyaknya persoalan masyarakat yang masih bertumpu pada peranan kepolisian dalam penanganannya. Dirinya meyakini jika Kapolri betul-betul profesional, berdedikasi, dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya, maka polisi akan semakin dicintai oleh rakyat. Tetapi sebaliknya, jika Kapolri mendatang tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional dalam melindungi masyarakat, maka polisi akan tetap menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Oleh karena itu Martin berharap, untuk menggantikan Kapolri, Presiden

harus transparan dan dengan ukuran yang jelas, dan harus dapat diterima dan dipertanggungjawabkan semua. Jangan sampai penggantian Kapolri dipercepat, namun yang terpilih malah jauh dari yang diharapkan semua pihak.

Seperti diketahui sejauh ini Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) menyiapkan Sembilan nama calon Kapolri, diantaranya Kepala Bareskrim, Komjen Sutarman, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, dan Gubernur Lembaga Pendidikan Kepolisian Komjen Budi Gunawan. (Ayu) Foto:Parle

Paripurna DPR Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat

Paripurna DPR menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. “Kita semua tentunya mengharapkan agar sembilan orang calon anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 terpilih merupakan wujud peran serta masyarakat dapat melaksanakan fungsinya dengan baik,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Kamis, (11/7).

Menurutnya, KPI Pusat memiliki tugas mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat terhadap penyiaran. “Kita mengharapkan anggota KPI Pusat periode 2013-2016, dapat melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,” tambahnya.

Kesembilan anggota KPI pusat yaitu, Bekti Nugroho, Judhariksawan, Agatha Lily, Azimah Subagijo, Idy Mu-



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso foto bersama dengan sembilan Anggota KPI terpilih.

zayyad, Amirudin, Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Danang Sangga Buwana, Fajar Arifinato Isnugroho.

Sementara empat calon anggota KPI Pusat 2013-2016 untuk pengganti

antar waktu, Iswandi Syahputra, Ezki Tri Rezeki Widianti, Nina Muthmainnah Armando, Muhammad Zen Al Faqih. (si)./foto: [iwan armanias/parle](#).

DPR Sepakati Pembentukan Pansus RUU Keuangan Negara



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Sidang Paripurna DPR yang digelar Kamis (11/7), menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Pansus ini beranggotakan 30 anggota dari berbagai komisi dan fraksi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, semua fraksi berhak untuk menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pansus dengan memperhatikan komposisi fraksi.

“Semua berhak untuk mendapatkan posisi Ketua atau Wakil Ketua Pansus, dengan memperhatikan konfigurasi fraksi. Karena selama ini setiap pemilihan anggota Pansus dan pimpinan Pansus seperti dari nol lagi,” jelas Priyo saat memimpin Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kamis (11/7).

Berikut adalah nama-nama anggota Pansus RUU tentang Keuangan Negara:

Fraksi Partai Demokrat: Andi Timo Pangerang, Andi Rachmat, Achasanul Qosasi, Linda Megawati, Supomo, Amin Santono, Reza Ali, dan Muhammad Nasir. Kemudian dari **Fraksi Partai Golkar:** Harry Azhar Azis, Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, Melchias Marcus Mekeng, Edwin Kawilarang, dan Irene Manibuy.

Selanjutnya dari **Fraksi PDI Perjuangan:** Isma Yatun, Olly Dondokambey, Hedrawan Supratikno, Sayed Muhammad

Muliady, dan Honing Sanny. **Fraksi PKS:** Memed Sosiawan, Bukhori Yusuf, dan Iskan Qolba Lubis. **Fraksi PAN:** Teguh Juwarno dan Muhajir.

Dari Fraksi PPP: Dimiyati Natakusumah dan Mustofa Assegaf. **Fraksi PKB:** Anna Mu'awanah dan Mirati Dewaningsih. **Fraksi Partai Gerindra:** Fary Djemy Francis. **Fraksi Partai Hanura:** Nurdin Tampubolon. (sf)foto:wahyu/parle

Fraksi-fraksi DPR Serahkan Pandangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012



Penyerahan Pandangan Fraksi terhadap Pelaksanaan APBN Tahun 2012.

Salah satu agenda dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (12/7) adalah pembacaan pandangan fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Namun, karena terkendala waktu, akhirnya diputuskan juru bicara masing-masing fraksi hanya menyerahkan pandangan secara tertulis kepada pimpinan sidang.

“Mengingat ini hari Jumat, kami menawarkan kepada hadirin, apakah

pandangan fraksi ini akan disampaikan melalui secara tertulis atau disampaikan secara langsung di podium. Jika setuju tertulis, untuk itu kami persilahkan kepada seluruh juru bicara untuk menyampaikan secara tertulis ke meja pimpinan,” jelas Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ketika memimpin Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Jumat (12/7).

Sohibul menambahkan, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, tanggapan

pemerintah terkait pandangan fraksi-fraksi, akan dijadwalkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013 – 2014. Direncanakan, akan digelar pada Paripurna 20 Agustus 2013.

Namun, keputusan pimpinan terkait penyampaian secara tertulis ini dikritisi oleh Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka. Ia menilai, masalah ini sangat penting, karena ada beberapa persoalan yang mendapat sorotan BPK dalam hasil audit atas pertanggungjawaban penggunaan APBN 2012 oleh pemerintah tersebut.

“Meskipun tadi telah disepakati bahwa penyampaian pendapat fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban APBN 2012, menurut saya ke depannya jangan demikian. Tapi karena hari ini adalah hari Jumat, kami mengerti karena persoalan waktu, pandangan fraksi tidak dibacakan. Hal-hal seperti ini ke depan semestinya tidak terjadi,” ujar Rieke.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sidang Paripurna 9 Juli lalu, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri sudah melaporkan RUU Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. (sf) foto:wahyu/parle

Kerusuhan di LP Tanjung Gusta Harus Diusut Tuntas



Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat.

Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat menyampaikan keprihatinan atas kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, Sumut. Ia mengaku beberapa kali berkunjung ke LP tersebut dan menilai kualitasnya cukup baik.

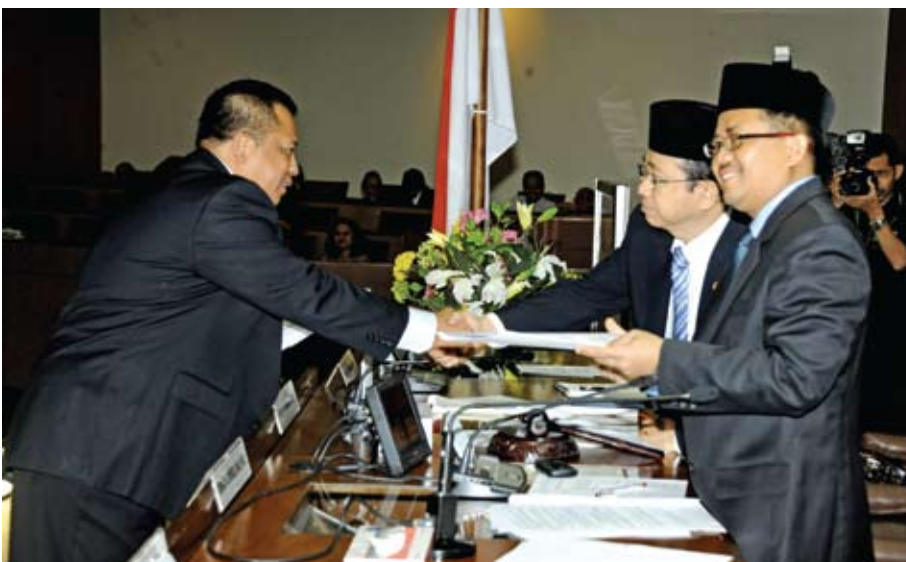
“Saya sudah berkali-kali ke lapas itu, sebenarnya saya lihat lapasnya cukup baik, lapangan tengahnya sangat besar, gedungnya bertingkat, sehingga menimbulkan tanda tanya juga sebenarnya ada apa kejadian ini sampai mengakibatkan kerusuhan yang begitu besar,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/13).

Ia meminta Menkumham segera melakukan evaluasi lengkap untuk melacak latar belakang dibalik kerusuhan yang mengakibatkan kaburnya ratusan napi. “Ada protes matinya air dan listrik tapi kemudian meluas menjadi protes PP 99/2012 tentang pengetatan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi napi koruptor dan narkoba, kok bisa?” paparnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ia merasa berkepentingan untuk segera meninjau lokasi. “Sore ini saya akan segera kesana,” tambah politisi FP Gerindra ini.

Ia juga berharap aparat kepolisian dapat bergerak cepat, mengerahkan segala daya upaya untuk mengembalikan narapidana yang melarikan diri ke lapas. “Ini penting untuk memberikan rasa aman kepada penduduk Kota Medan dan sekitarnya karena mereka pasti mengkhawatirkan masalah keamanan,” demikian Martin. (iky)

Banggar Patok Angka Pertumbuhan RAPBN 2014 Sebesar 6,4 persen



Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjiyanto menyerahkan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2014.

Rapat Paripurna DPR RI ke-32 pada Jumat (12-7) memberi kesempatan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014.

Dalam laporannya yang disampaikan Djoko Udjiyanto (F-PD), Banggar telah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 6,4%-6,9%. Angka tersebut merupakan kesepakatan pembicaraan antara DPR dan pemerintah. Sebelumnya, dalam APBN-P 2013, angka pertumbuhan ditetapkan sebesar 6,2%.

Banggar juga menetapkan asumsi dasar lainnya menyangkut inflasi. Bila

dalam APBN-P 2013 ditetapkan 7,2%, maka pada RAPBN 2014 angka inflasi dikoreksi lagi menjadi lebih menjanjikan pada 3,5%-5,5%. Angka inflasi yang hampir sama terjadi pada APBN 2013, yaitu 4,9%.

Nilai tukar rupiah dipatok Rp9.600-

Rp9.800, angka diperkirakan sedikit lebih rendah dari penetapan APBN-P 2013 yang dipatok Rp9.600. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan ditetapkan 4,5%-5,5%. Pada APBN-P 2013 suku bunga SPN ditetapkan 5%.

Sementara itu, harga minyak/ICP

disepakati USD 100-115 per barel. *Lifting* minyak 860-900 ribu barel per hari. *Lifting* gas bumi 1.240-1250 ribu barel setara minyak bumi per hari. Dan terakhir, *lifting* minyak dan gas bumi untuk RAPBN 2014 berkisar pada 2.100-2.150 ribu barel per hari. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Dewan Minta Pemerintah Susun RAPBN 2014 Secara Cermat

DPR meminta pemerintah menyusun RAPBN tahun 2014 secara cermat dan hati-hati. Jika memungkinkan tidak perlu menambah hutang baru dalam struktur RAPBN tahun 2014.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie, saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Jum'at, (12/7).

Dewan, lanjut Marzuki, menilai RAPBN Tahun 2014 sebaiknya lebih fokus pada stimulus fiskal, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (PDB) tetap berada di atas

6,0 persen.

“Dewan mendesak Pemerintah untuk tidak menaikkan besaran anggaran belanja negara dalam RAPBN Tahun 2014 yang tidak produktif, seperti belanja perjalanan dinas pusat dan daerah, belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Hal ini mengingat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013, anggaran belanja negara justru meningkat dari Rp. 1.683,011 triliun menjadi Rp. 1.726,191 triliun, dimana porsi terbesar adalah belanja pemerintah pusat,” terangnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Suasana Sidang Paripurna DPR RI

Banggar Tetapkan RKP 2014

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menetapkan pokok-pokok kesepakatan menyangkut pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014. Ada tiga kesepakatan hasil pembahasan RKP, yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar Djoko Udjiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (12/7). Dalam laporannya, Banggar menyampaikan, yang termasuk dalam pemantapan ekonomi nasional di antaranya adalah, konektivitas mendorong pertumbuhan, perkuatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan Iptek, dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Djoko juga menyampaikan bahwa di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, Banggar telah



Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjiyanto.

menyusun poin-poin penting untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Misalnya, melaksanakan SJSN (sistem jaminan sosial nasional) bidang kesehatan, perluasan program keluarga harapan, mitigasi bencana, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

RKP lainnya adalah menyangkut pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Di bidang ini, lanjut Udjiyanto, ada 3 poin yang harus dijalankan pemerintah, yaitu percepatan pembangunan *minimum essential force*, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, dan terakhir pelaksanaan Pemilu 2014.

Seperti diketahui, semua faktor sangat penting untuk menstabilkan perekonomian. Tanpa dukungan keamanan dan politik, ekonomi nasional sulit berjalan sesuai yang direncanakan bersama antara DPR dan pemerintah. (mh) / foto:iwan armanias/parle.

25 RUU Masih Dibahas di Pembicaraan Tingkat I

Terdapat sekitar 25 RUU masih dalam Pembicaraan Tingkat I dan pembahasannya masih akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

“RUU-RUU tersebut telah mendapat persetujuan untuk diperpanjang, baik yang ditangani oleh Komisi-Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus.” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat membacakan pidato penutupan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Jum’at, (12/7).

Terkait RUU Ormas, lanjutnya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memakan waktu pembahasan sampai tujuh kali masa sidang. “Alhamdulillah, akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juli yang lalu,” jelasnya.

Menurutnya, materi muatan RUU ini telah mengakomodir masukan dari berbagai Ormas, pakar, dan masyarakat umum. “Panitia Khusus telah bekerja secara maksimal, dalam kesempatan ini Dewan mengingatkan, bahwa ruh dari RUU Ormas bukanlah untuk membelenggu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, melainkan untuk menata pengelolaan dan penyelenggaraan Ormas,” katanya.

Dia mengharapkan Ormas dapat berperan menjadi agen perubahan masyarakat, mitra Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, proses pembahasan atas RUU tentang Pencegahan dan



Suasana Sidang Paripurna DPR RI

Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilaksanakan pada delapan kali masa sidang, telah disetujui untuk disahkan menjadi UU. “Muatan materi RUU ini diharapkan dapat mengatasi laju kerusakan hutan Indonesia yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan Indonesia,” jelasnya.

RUU lain yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, lanjutnya, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Melalui RUU ini diharapkan kepentingan para petani semakin terlindungi, terutama ketika menghadapi bencana alam, globalisasi, serta sistem pasar yang tidak adil, yang selama ini semakin menyudutkan keberadaan petani dalam melangsungkan usahanya.

Sementara, RUU tentang Keantariksaan dibentuk antara lain untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam

penyelenggaraan keantariksaan, mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktifitas bangsa, menjamin keberlanjutan keantariksaan bagi kepentingan generasi kini dan masa depan.

Menyinggung RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang dibahas selama tujuh kali masa sidang, paparnya, mengandung berbagai substansi yang sangat urgen, strategis dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran.

“RUU ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum untuk mengatasi dan mengatur berbagai problem yang terkait dengan proses seleksi, proses belajar-mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta alat-alat laboratorium, tenaga pendidikan, dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran,” katanya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.

Faktor Internal Penyebab Kehancuran Merpati

Maskapai penerbangan milik pemerintah, Merpati, kian diambang kebangkrutan. Selain dililit utang, beberapa waktu lalu pesawatnya juga mengalami kecelakaan. Ini memperpanjang daftar keburukan Merpati.

Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Jumat (12/7), menegaskan, industri penerbangan adalah sektor industri yang pertumbuhannya sangat tinggi. Daya tarik industri ini juga sangat

tinggi. Bila industri seperti ini sampai goyah, itu berarti ada yang salah dengan internal perusahaan.

“Kalau ada perusahaan yang bergerak di industri yang daya pertumbuhannya sangat tinggi, lalu mati, itu artinya *mismanagement*. Itu faktornya internal, bukan faktor eksternal,” tandas Hendrawan yang juga anggota F-PDI Perjuangan tersebut.

Komisi VI, kata Hendrawan, hingga kini belum membentuk Panja untuk membicarakan Merpati dengan pihak pemerintah. “Kami memutuskan untuk memberi kesempatan Kementerian BUMN untuk mengelaborasi opsi-opsi strategis yang akan diambil.”

Beberapa opsi yang ditawarkan Komisi VI untuk Merpati adalah menurunkan skala (*scaling down*), meneruskan skala yang sama tapi butuh biaya sangat besar, membangun kerja sama dengan pihak lain, atau dilikuidasi. Yang dimaksud dengan menurunkan skala adalah rute penerbangannya dipersempit hanya pada rute-rute gemuk saja, yang menurut Merpati menguntungkan. Dari 80 rute, misalnya, menjadi 40 rute. (mh)/foto:iwan armanias/parle.



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno.

RUU Desa Tinggal Menunggu Persetujuan Pemerintah

Nasib RUU desa tinggal menunggu persetujuan pihak pemerintah. DPR sendiri sudah meyetujui hampir 100% draf RUU ini. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyampaikan hal tersebut saat menerima delegasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Jumat (12/7).

Priyo sangat mengapresiasi delegasi PPDI yang begitu antusias mengikuti perkembangan pembahasan RUU Desa. Tak ada masalah dengan DPR. RUU ini justru terganjal oleh pemerintah, karena masih ada beberapa pasal yang belum disetujui Depdagri. Seperti diketahui, produk RUU yang dibahas di DPR, harus atas persetujuan kedua belah pihak, baik DPR maupun pemerintah. Salah satu tidak setuju, RUU ini tidak bisa disahkan.

“Sangat tidak lazim bila RUU ini divoting dengan pihak pemerintah di rapat paripurna,” kata Priyo dengan penuh tawa. Sementara itu, delegasi PPDI menyampaikan agar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengawal dan memantau terus perkembangan RUU ini sampai bulan Oktober. Bila sampai bulan tersebut RUU ini tidak ada perkembangannya, kemungkinan besar akan dilupakan para anggota DPR yang mulai sibuk dengan Pemilu.

Pasal krusial yang belum mendapat persetujuan pemerintah adalah menyangkut pengangkatan aparat desa menjadi PNS. Pihak PPDI minta, bila aparat desa tidak bisa diangkat menjadi PNS, mereka minta agar digaji secara resmi dari APBN sesuai besaran gaji PNS golongan IIA.

Beberapa kali delegasi PPDI ingin bertemu Mendagri tapi selalu sulit ditemui. Apresiasi justru ditujukan kepada DPR yang sangat akomodatif terhadap tuntutan aparat desa dan bekerja merumuskan RUU Desa sesuai dengan aspirasi PPDI. Pimpinan DPR malah mudah ditemui ketimbang menteri yang levelnya di bawah DPR. (mh)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Banggar Laporkan Sebelas Prioritas Nasional



Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjiyanto.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam Rapat Paripurna memberikan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2014. Dalam salah satu laporannya, disebutkan tentang prioritas nasional yang harus dilakukan pemerintah pada 2014.

Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjiyanto (F-PD), Jumat (12/7), menjelaskan, ada 11 prioritas nasional hasil kesepakatan pembicaraan Banggar dengan pemerintah. Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola yang diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Artinya, perlu ada kerja terpadu, integritas,

akuntabel, taat hukum, transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, baik di pusat maupun daerah.

Sektor pendidikan masuk dalam prioritas kedua. Sektor ini diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas, terjangkau, dan efisien menuju kesejahteraan masyarakat. Keluhuran budi pekerti, kemandirian, menciptakan karakter bangsa yang kuat, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Prioritas ketiga, lanjut Djoko, adalah kesehatan. Sektor ini harus melalui pendekatan preventif terpadu, tidak kuratif. Dengan demikian, angka harapan hidup rakyat Indonesia akan meningkat. Sektor keempat, penanggulangan kemiskinan. Ini diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan yang pro rakyat.

Ketahanan pangan menjadi prioritas kelima. Penyediaan bahan pangan harus ditingkatkan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri, terutama komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Sejalan dengan ini, peningkatan perlindungan dan pemberdayaan para petani plus nelayan juga harus dilakukan.

Selanjutnya Djoko menyampaikan prioritas sisanya dalam laporannya tersebut. Prioritas keenam, infrastruktur. Ketujuh, iklim investasi. Kedelapan, energi. Kesembilan, lingkungan hidup. Sepuluh, pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah-daerah pasca-konflik. Terakhir, prioritas sebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

Dewan Desak Pemerintah Awasi Program BLSM

Terkait dengan persetujuan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Dewan terus mendorong Pemerintah untuk memperlancar dan melaksanakan pengawasan dalam pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin.

Disisi lain, ujar Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan dapat disalurkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, anggaran untuk pembangunan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

infrastruktur, pengembangan energi baru terbarukan, serta program-program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi lainnya.

“Program BLSM yang mulai berjalan, hendaknya diawasi secara intens agar tepat sasaran, menghindari seminimal mungkin jatuhnya korban akibat mekanisme pelaksanaan yang kurang baik dan data yang kurang akurat,” jelasnya saat membacakan pidato Penutupan Sidang Paripurna IV, di Gedung Nusantara II, Jumat, (12/7).

Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalahantisipasi dampak akibat penyesuaian harga BBM yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan. “Memang dipastikan dapat berdampak kepada kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif, melakukan operasi pasar, menindak praktek penimbunan dan

mengambil langkah berani dan tegas dalam pengendalian harga, agar tidak menambah beban masyarakat. Penyesuaian harga BBM juga harus dijadikan kesempatan bagi Pemerintah untuk mendorong dan mengubah pola hidup masyarakat yang lebih hemat energi,” tambahnya.

Hal ini, tambahnya, dimaksudkan

untuk pengelolaan ketahanan energi ke depan menjadi lebih baik dan penghematan anggaran. “Seiring dengan tujuan ini, Dewan meminta Pemerintah untuk terus memberikan perhatian bagi pengembangan sarana transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” katanya. (si)/
foto:iwan armanias/parle.

Kembalikan Peran Bulog Tangani Sembako



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memberikan keterangan kepada wartawan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, selama 8 tahun menjadi anggota Dewan dan menjabat Pimpinan Komisi selama 3 tahun, masalah sembako tidak pernah akan selesai. Karena *mindset* (cara berpikir) liberalism, sehingga harus dikembalikan kepada peran Badan Urusan Logistik (bulog).

Hal itu dikatakan Aria Bima menjawab pers sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR Jumat (12/7) menanggapi meroketnya harga sembako belakangan ini yang sudah tidak terkendali. Kenaikan bahan pokok termasuk daging, telur, ayam dan sayuran sangat meresahkan keluarga di berbagai daerah.

Menurut Pimpinan Komisi yang membidang perdagangan dan perindustrian, Bulog tidak hanya mengurus masalah beras saja, tetapi badan uru-

san logistik dalam skala nasional. Karena itu badan ini harus masuk intervensi tidak hanya dalam kebijakan melainkan juga pengawasan dan koordinasi, serta melakukan langkah-langkah operasional ke seluruh Indonesia.

Dengan demikian, lanjut Aria Bima, kalau terjadi lonjakan-lonjakan harga atau liar dan sangat membebani masyarakat, *intervensi negara harus riil*. “Nggak bisa operasi pasar, bukan hanya masalah *suplay and demand* tetapi juga masalah distribusi, juga masalah kartelisasi dan spekulasi. “Dari hulu hingga hilir memang harus kita benahi, dan masalah distribusi negara harus terlibat,” ujarnya.

Ia mengharapkan, hendaknya jangan rakyat langsung dihadapkan pada mekanisme pasar, padahal liberalisasi kebutuhan pokok jelas terlihat peran negara yang tidak mampu. “Siapa

yang menurunkan harga sembako sekarang. Kalau operasi pasar sifatnya massif dari Sabang sampai Merauke, pakai duitnya siapa, barangnya siapa, “ujarnya tegas.

Karena itu harusnya tidak ada liberalisasi sektor pangan dan masalah ini akan diatur dalam RUU Perdagangan yang tengah disusun DPR. Akan ditegaskan bahwa untuk kebutuhan pokok peran negara, diberi hak untuk melakukan monopoli, diberi hak untuk melakukan kartelisasi negara. “Peran Bulog dioptimalkan, tidak hanya beras tetapi juga sembako. Kita jangan nurut IMF. Yang mengembalikan peran Bulog hanya soal beras atas saran IMF dan Bank Dunia, ini harus kita lawan. Di negara manapun, pangan nasional menjadi skala prioritas negara,” tandas vokalis PDI Perjuangan. (mp)/*foto:iwan armanias/parle.*

Ketimbang Debat PT Lebih Baik Parpol Lakukan Konsultasi dan Komunikasi

Pembahasan RUU Pemilihan umum Presiden yang mengalami kebuntuan di tingkat Badan Legislatif, masih mengundang komentar dari anggota DPR. Perdebatan alot menyangkut masalah *Presidential threshold* (PT). “Sekarang waktunya, dari pada berdebat menurunkan PT, jauh lebih produktif melakukan konsultasi dan komunikasi antar Pimpinan Parpol sehingga terjadi koalisi menjadi gabungan parpol,” tandas anggota DPR Hajrianto Tohari di Jakarta, baru-baru ini.

Apalagi lanjut politisi FPG ini, Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengatakan batas waktu pengesahan RUU Pilpres Oktober 2013 harus sudah ada keputusan, karena 1 Oktober 2013 tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai dilakukan.

Lima fraksi DPR yaitu FPG, FPD-I-P, FPAN, PKB dan Fraksi PD menginginkan agar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu tak direvisi. Sedangkan empat fraksi mendukung revisi Fraksi PPP, PKS, Hanura dan Gerindra.

Menurut Hajrianto, parpol bisa menjajagi berkoalisi dengan parpol lain, dan itu menjadi jiwa dari *Presidential Threshold* (PT) itu, karena UUD 45 mengamanatkan bahwa capres dan cawapres diajukan oleh satu paket oleh parpol atau gabungan parpol. Untuk terbentuknya gabungan parpol sehingga tercapai PT itu perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi.

Lebih jauh politisi FPG yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini menegaskan, semua parpol harus memulainya sejak sekarang, apalagi untuk membicarakan suatu yang sangat serius seperti capres. Untuk itu diperlukan penda-



Anggota Komisi I DPR Hajrianto Tohari.

huluan atau prolog dengan kontak-kontak dulu, pertemuan buka bersama lalu beranjak ke pembicaraan lebih serius. Disitulah terbentuk ruangan untuk negosiasi politik. “Negosiasi politik itu bukan politik dagang sapi, tetapi untuk memenuhi konstitusi-gabungan parpol supaya kehidupan politik ke depan tidak terlalu kompleks,” tegasnya.

Dengan terjadinya koalisi besar misalnya tiga buah koalisi dari tiga gabungan parpol sehingga akan memunculkan tiga pasangan capres, hal itu akan bagus. Di parlemen juga akan terjadi pengambilan keputusan lebih simple dan sederhana. Yang terjadi sekarang pengambilan keputusan sangat kompleks karena terlalu banyak lingkaran-lingkaran.

“Saya rasa sejalan dengan konstitusi kita, karena kita akan perkuat sistem presidensiil, maka tidak ada cara lain, jumlah parpol disederhanakan,” kata Hajrianto menambahkan. (mp)

Ketua DPR Terima Anugerah Tahfiz Award Sumatera Selatan 2013

Ketua DPR Marzuki Alie menerima Anugerah Tahfidz Award Sumatera Selatan 2013 disela-sela acara wisuda 176 santri tahfidz (penghafal Al Qur’an) dari 21 rumah tahfidz se-Sumatera Selatan di kawasan Rumah Tahfidz Cendekia Faiha, Sukarame, Palembang, Minggu (14/7).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ustadz Subkhi selaku pemilik rumah tahfidz cendekia faiha yang juga sebagai ketua panitia acara yang bertema “Wisuda Akbar Sumsel Menghafal II

Bersama Syeikh Ali Jaber”.

Anugerah Tahfidz Award yang diterima Marzuki Alie merupakan penghargaan sebagai tokoh sekaligus donatur yang peduli terhadap pendirian beberapa rumah tahfidz di Palembang. Selain dirinya, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Mantan Imam Masjid Madinah Syeikh Ali Jaber, Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Syofwatillah Mozaib dan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS

Mustafa Kamal.

Dalam sambutannya, Marzuki berharap bahwa dengan acara tersebut bisa memotivasi anak-anak untuk giat belajar dan cinta Al Qur’an karena saat ini menurutnya susah mencari guru mengaji yang benar di kota-kota besar. “Semoga semakin banyak rumah-rumah tahfidz sehingga kemurnian Al Quran selalu terjaga,” kata Marzuki Alie.

Lebih lanjut Marzuki mengatakan



Syeikh Ali Jaber disaksikan Ketua DPR RI Marzuki Alie menandatangani Prasasti Pembangunan Rumah Tahfidz Al Quran di Palembang.

bahwa Allah menjamin kemurnian Al Qur'an sampai akhir zaman tapi itu melalui manusia, yaitu melalui kita semua. Kita harus berkontribusi dalam bentuk apapun, minimal membantu dengan do'a. Dirinya juga berpesan untuk pengurus rumah tahfidz, harus ada yang benar-benar hafal Al Qur'an, karena banyak Al Quran palsu yang beredar dengan mengubah ayat-ayatnya sehingga menjadi berbeda maknanya.

Disisi lain Marzuki juga mengharapkan pemimpin kedepan peduli dengan pendidikan agama. Karena akibat dari kurang tersentuhnya pendidikan agama maka terjadi dekadensi moral dimana-mana. "Seperti terkena narkoba, pergaulan bebas, tawuran, anak memukul orang tua, merusak kampusnya, ini karena pendidikan yang tidak lengkap di masa lalu," ungkap Marzuki Alie.

Mengakhiri sambutannya, Ketua DPR RI asli putra Palembang ini meyakini bahwa dengan Al Qur'an hidup menjadi berkah. Ia mencontohkan ketika pembuatan Al Qur'an Akbar yang meraih rekor MURI digagas oleh Syofwatillah Mozaib, dirinya mendukung sebagai ketua panitia, yang menyumbang pertama kali salah satunya Taufik Kiemas (Almarhum), kemudian Pak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Berkah Al Quran itu terbukti dengan fakta yang menyumbang pertama menjadi anggota DPR, ketua panitianya jadi Ketua DPR, yang menyumbang berikutnya jadi Ketua MPR dan pak SBY jadi Presiden, itulah hebatnya Al Quran. Pak Alex Noerdin yang dulu menyumbang sewaktu jadi Bupati, nah sekarang dia jadi Gubernur, itulah berkah Al Qur'an," ujar Marzuki diikuti tepuk tangan peserta.

"Nah yang sekarang menyumbang rumah tahfidz insyaAllah besok bisa jadi menteri, yang sedang bicara dan berdiri didepan jadi presiden," kelakar Marzuki diiringi riuh rendah para hadirin.

Mantan Imam Masjid Madinah, Syeikh Ali Muhammad Ali Jaber berharap para penghafal Al Qur'an di Indonesia terutama di Sumatera Selatan tidak hanya menghafalkan, tetapi juga memperhatikan bacaan yang benar. Syeikh Ali menyayangkan banyak penghafal Al Qur'an di Indonesia yang tidak memperhatikan makhrojul (pelafalan) huruf Qur'an.

"Saya mengharapkan anak-anak penghafal Al Qur'an ini memperhatikan lebih baik pelafalan Qur'an dan mengamalkan apa yang mereka hafalkan," pesannya.

Sementara, atas nama pemilik rumah tahfidz cendekia faiha sekaligus ketua panitia Ustadz Subkhi, mengapresiasi kepedulian para tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Dirinya mengakui bahwa alasan mengundang para tokoh tersebut bukanlah karena latar belakang partainya, melainkan karena mereka peduli. "Beliau hamba Allah yang selama ini dikenal peduli dengan perkembangan pondok pesantren, diantaranya rumah tahfidz Al Quran ini," jelas Ustadz Subkhi. *Odjie (foto:odjie)*

Merpati Harus Tetap Dipertahankan

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan, maskapai penerbangan nasional PT Merpati harus tetap dipertahankan. Maskapai pemerintah itu harus tetap eksis untuk melakukan terobosan-terobosan usaha penerbangan perintis.

"Merpati sebagai armada badan usaha milik negara yang orientasi bukan pada korporasi melainkan lebih kepada kepemilikan negara. Tugasnya adalah menyambung, membuka, memfasilitasi transportasi daerah-daerah terpencil seperti halnya kita memfasilitasi Pelni dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagai lalu lintas laut untuk orang dan barang," ujarnya di Jakarta menanggapi keterangan Meneg. BUMN bahwa Merpati akan dijual.

Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary Merpati

Herry Saptanto melalui keterangan tertulisnya juga menanggapi pemberitaan di media massa, yang menyebutkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan akan menjual Merpati kepada investor strategis.

"Yang dimaksud dengan menjual kepada investor strategis adalah mengundang investor strategis yang berminat memperkuat permodalan Merpati dengan cara membeli sebagian saham Merpati. Dengan adanya investor strategis yang membeli saham Merpati, permodalan Merpati akan semakin kuat sehingga Merpati dapat meningkatkan kinerja operasinya untuk menjadi lebih baik dan dapat menambah armada," ungkapnya.

Lebih lanjut Aria Bima mengatakan, upaya Merpati yang

mengadakan jet besar dengan maksud ingin bersaing dengan maskapai-maskapai besar, itu salah. “Menteri BUMN saya anggap tidak mengerti awal muawalnya Merpati mau diapakan. Kalau saja ingin dipailitkan kan sejak dulu. Ganti menteri nya saja, kebijakannya nyleneh ga karuan. Atau mungkin Deputinya yang nggak ngerti membina Merpati kearah mana,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Saat ditanyakan tentang usaha Merpati untuk membayar utang dan dikonversi sebagai saham, Aria Bima mengang-

gap langkah itu yang paling tepat. Pasalnya ini sudah terjadi kong kalikong, model mempailitkan BUMN dan menyiapkan *funding* dimana orang-orang disekitar kementerian juga terlibat di dalam proses pembelian BUMN-BUMN yang dipailitkan.

“Hati-hati ini, Komisi VI DPR mencurigai ada *by design*, terlalu cepat mempailitkan Badan Usaha Negara untuk diakuisisi oleh perusahaan – perusahaan swasta yang layak,” demikian Aria Bima. (mp)

Koperasi Bisa Bersaing Secara Global

Koperasi di Indonesia masih bisa bersaing secara global asal dikelola dengan baik dan profesional. Dan bila ingin bersaing, insan koperasi harus berbenah. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Atte Sugandi, saat dihubungi Selasa (16/7).

Saat ini jumlah koperasi di Indonesia sekitar 194 ribu unit. Pertumbuhan rata-rata koperasi di Indonesia adalah 5% per tahun. Tidak seperti industri perbankan yang terus melejit dan besar, usaha koperasi selalu jatuh bangun. Buka tutup usaha koperasi sudah jadi pemandangan umum.

Atte yang Anggota F-PD ini, masih memandang koperasi dengan positif. “Saya melihat positif dunia koperasi kita. Selama dikelola dengan baik, dia bisa bersaing secara global. Tapi, kalau dikelola asal-asalan, ya tentu tidak bisa

bersaing,” katanya. Koperasi, jelas Atte, ada 4 macam, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

“Pengaturan soal koperasi sudah baik dalam UU. Tinggal para insan koperasinya yang perlu dibenahi sebagai entitas koperasi.” Menyoal jatuh bangun usaha koperasi ini, Atte lalu memberi gambaran menarik. Seekor monyet dan kancil bersaing menanam pohon pisang. Monyet menanam pisang dari jatungnya. Sedang kancil yang cerdas, menanam pisang dari tunas pisangnya. Tentu kancil unggul dan pohon pisangnya tumbuh lebih cepat.

Begitulah realitas membangun koperasi di Tanah Air. Koperasi harus dibangun dari sumbernya yang tepat, baik pendanaannya maupun entitas-



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi.

nya. Di Lampung, daerah pemilihannya sendiri, lanjut Atte, banyak sekali koperasi yang berkembang baik.

Media massa harus menyosialisasikan perkembangan dan kemajuan koperasi di Tanah Air. Atte mengungkapkan, contoh paling konkrit adalah koperasi di Sekretariat Jenderal DPR RI yang maju pesat. (mh) foto:ry

Impor Daging Untuk Netralisir Harga



Anggota Komisi VI DPR Ida Ria Simamora.

Kebijakan impor daging sapi dari Australia dinilai sebagai salah satu mekanisme untuk menetralkan harga komoditas daging yang telah membumbung tinggi di pasaran. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Ida Ria Simamora yang dihubungi *Parlemen*, Selasa (16/7).

Seperti diketahui harga daging sapi sudah menembus Rp 100 ribu-Rp 120 ribu per kilogram. Bila sudah masuk pasar, daging impor dapat dijual Rp 70 ribu-Rp 80 ribu per kilogram. Dan pemerintah telah mengimpor daging sapi dari Australia sebesar 300 ribu

ton. “Kalau mau murah memang harus impor. Tapi, kalau impor terus juga, ya kasihan para petaninya,” ujar Ida.

Menurut Anggota F-PD ini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah luar biasa, walaupun sedikit terlambat. Persoalannya ada pada koordinasi dan administrasi antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Selama ini, kata Ida, Bulog yang ditugasi mengimpor daging, belum mendapat persetujuan dari kementerian terkait, sehingga mengalami keterlambatan.

“Tidak mungkin Bulog mengimpor tanpa koordinasi dengan kementerian perdagangan.” Ditanya soal adanya regulasi yang melarang daging impor masuk ke pasar tradisional, Ida menjawab, dalam kondisi darurat seperti ini di mana pasokan daging kurang dan

harga telah membumbung tinggi, tidak ada jalan lain selain impor.

Apalagi, lanjutnya, para petani kita tidak bisa memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri yang terus meningkat selama Ramadan dan jelang Idul Fitri.

“Tidak ada pilihan lain, memang, kecuali mengimpor daging, karena para petani belum mampu penuhi kebutuhan,” ungkapnya. Namun, seiring dengan kondisi ini, semua instansi terkait harus pula berbenah diri, termasuk membenahi infrastrukturnya. (mh)

PP Tidak Boleh Bertentangan dengan Undang-undang

Ketua DPR RI, Marzuki Alie ditemui usai buka Puasa bersama dengan Presiden SBY, Wapres Boediono beserta para Petinggi Negara, Senin (15/7) mengungkapkan bahwa PP (Peraturan Pemerintah) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan jika PP bertentangan dengan UU, harus dibatalkan.

Marzuki mempersilahkan pihak yang ingin mengubah UU, namun tentunya harus melalui proses hukum. Begitupun dengan munculnya keinginan beberapa pihak yang ingin mencabut PP No.99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Pemberian Remisi.

“Pro dan kontra soal PP ini harus tetap diselesaikan. Jalur hukum masih memungkinkan untuk menuntaskan perdebatan ini. Makanya silahkan saja *Judicial review* PP itu di MA (Mahkamah Agung, red) terhadap UU,” kata Marzuki. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan dari jalur hukum ini nanti Hakim MA akan melihat mana yang realistis, apakah PP tersebut melanggar UU atau tidak.

Lebih lanjut tentang kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan, Marzuki mengatakan bahwa selain *over capacity* yang terjadi hampir di setiap Lapas, kerusuhan itu sebenarnya akibat dari hak dasar narapidana tidak terpenuhi.

“Dimana napi mau sholat tidak ada air, mau mandi tidak ada air, hal ini membuat hak dasar dari napi tidak terpenuhi dan akhirnya munculah gejolak tersebut,” ungkap Marzuki.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat wawancara Pers.

Marzuki menganggap bahwa kerusuhan itu merupakan pelajaran dan tanggung jawab untuk semua pihak, terutama Kalapas agar lebih arif lagi dalam melayani dan mengawasi napi diharapkan semakin hari semakin baik.

“Pada awalnya kan namanya pemasyarakatan, dengan maksud agar napi bisa kembali ke masyarakat dengan baik melalui proses pembinaan,” ujar Marzuki. (Ayu)foto:wahyu/parle

Pemantauan CCTV Polri Perlu Diperbanyak

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai pemantauan keamanan dan lalu lintas dengan menggunakan peralatan kamera monitor - CCTV cukup efektif. Ia meminta Polri mengoptimalkan peralatan tersebut dalam pengamanan Ramadan dan Lebaran nanti.

“CCTV perlu diperbanyak dalam mendukung kinerja selama Ramadan dan Idul Fitri. Kita bisa belajar pada kasus

kecelakaan artis Ari Wibowo yang terbukti tidak bersalah setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang ada disebuah toko,” paparnya dalam rapat dengan Asisten Operasi Mabes Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Ia juga mengusulkan agar dalam proses pengamanan kali ini Polri melakukan survey publik untuk mengetahui tingkat



Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil.

pelayanan selama Ramadan dan Lebaran. “Masukan publik lewat survey penting untuk perbaikan di masa datang, apakah publik puas atau malah dipalaki polisi,” tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi III Syarifudin Sudding mengingatkan kasus raibnya 250 batang dinamit di kawasan Bogor agar disikapi dengan serius oleh Polri. “Hilangnya 250 batang dinamit ini harus diseri-us-i, kalau tidak diusut tuntas bisa menimbulkan keresahan,” kata Sudding yang juga Ketua FP Hanura DPR ini.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin ini, untuk mengetahui persiapan pengamanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Operasional (ASOP) Mabes Polri Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, didampingi Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten dan Kapolda Jabar serta Kakorlantas Mabes Polri. (iky)

Komisi V Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Angkutan Lebaran



Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik meninjau kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat pada Lebaran 2013. Kunjungan ini bagian dari kinerja pengawasan untuk meli-

hat langsung sejumlah persiapan yang telah dilakukan pemerintah.

“Kunjungan ini akan fokus melihat langsung di lapangan apa yang sudah dilakukan mitra kerja kita terutama

Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU,” kata anggota Komisi V, Hetifah dalam acara dialog radio ‘Bersama Wakil Rakyat kerjasama Pemberitaan Setjen DPR dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (19/7/13).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan sejumlah program persiapan Lebaran 2013 memang telah mendapat dukungan dan persetujuan anggaran dari DPR. Ia berharap seluruh perencanaan yang pernah dipaparkan pemerintah sesuai dengan pelaksanaannya. “Kita berharap mutu dilapangan nanti sesuai dengan perencanaan,” tegasnya.

Dari jadwal yang diperoleh dari Sekretariat Komisi V, peninjauan pertama dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, 22-23 Juli 2013. Ada beberapa lokasi yang akan dipantau langsung diantaranya Terminal Bus Purabaya Bungurasih, Pelabuhan Tanjung Perak dan Stasiun Kereta Api Pasar Turi.

Tim Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jatim ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said, diikuti oleh anggota komisi perwakilan dari 9 fraksi. (iky)

DPR Minta Pemerintah Serius Bahas Revisi UU Jalan



Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi didampingi Sekjen MTI Ellen Tangkudung dalam acara Forum Legislasi di Press Room DPR.

DPR RI menginginkan keseriusan dari Pemerintah dalam membahas Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Draft revisi UU tentang Jalan sudah ada semenjak dua tahun lalu.

“Dua bulan setelah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Kementerian PU, Kemenhub, Kemendagri dan Kemenkumham untuk bersama DPR membahas RUU Jalan. Tapi dua bulan juga setelah Presiden memerintahkan empat kementerian itu, pemerintah memberi signal bahwa UU Jalan belum waktunya direvisi,” kata Anggota Komisi V DPR Arwani Thomafi dalam acara Forum Legislasi di pressroom DPR, Jakarta, Selasa (16/7).

Akibatnya, lanjut dia, proses pembahasan RUU Jalan tersebut sangat tidak kondusif. “Padahal SBY sudah perintahkan empat menteri untuk membahas itu, tapi perintah tersebut tidak efektif,” tegasnya.

Mengingat urgensi revisi UU Jalan, politisi PPP itu menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan upaya persuasif terhadap pemerintah agar mau membahasnya. Selama ini, lanjutnya,

UU Jalan hanya mencakup kualifikasi jalan berstatus nasional.

“Jalan provinsi, kabupaten dan kota termasuk pembiayaan pemeliharaannya, belum diatur oleh UU. Prakteknya kabupaten tidak sanggup memelihara jalan yang ada apalagi membangun jalan baru,” tegas anggota Pansus RUU Jalan itu.

Dituturkannya, pemerintah mengeluarkan wacana baru lagi sebagai cara untuk menghindari pembahasan revisi UU Jalan. Yakni dengan melontarkan rencana akan menaikkan status jalan provinsi dan kabupaten menjadi jalan nasional.

“Kalau cara itu yang ditempuh, maka semua jalan nasional akan bernasib sama dengan jalur Pantura Pulau Jawa yang tidak akan pernah selesai perbaikannya karena ditangani melalui mekanisme proyek. DPR ingin semua permasalahan jalan diselesaikan melalui program, bukan proyek,” imbuhnya.

lebih lanjut Arwani Thomafi mengatakan, RUU tentang Jalan yang kini masih dalam tahap pembahasan awal, menemui beberapa permasalahan. Salah satunya adalah mengenai

ketersediaan lahan. “Saya pikir perlu ada langkah terobosan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan lahan, misalnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Kalau konsep seperti sekarang di mana pemerintah mengangap jalan sebagai beban anggaran bukan sebagai aset masih dipertahankan, lanjut Arwani, yang terjadi bukan pendekatan bagaimana ada pemanfaatan yang luar biasa ketika kita membuat jalan baru.

“Mestinya masyarakat juga diuntungkan dengan dibukanya jalan baru, setelah mereka turut berpartisipasi dengan merelakan lahannya dijadikan jalan. Dan, jika itu ingin terwujud tentunya harus dinormakan,” tegasnya.

Substansi yang ditekankan oleh Panja RUU Jalan, sambung legislator dari Fraksi PPP itu, tidak sampai pada persoalan panjang jalan, tetapi lebih kepada kualitas jalan. “Persoalan perbaikan dan perawatan selama ini menjadi problem khususnya menyangkut pembiayaan. Tetapi, kita ingin menyelesaikan persoalan itu dalam RUU Jalan,” pungkasnya.

Arwani menjelaskan, Pansus RUU Jalan sudah menyerahkan sekitar 200 daftar inventarisasi masalah (DIM) ke pemerintah. Dari 200 DIM itu, sampai saat ini pemerintah baru menyetujui 10 DIM. “Padahal Pasal 34 Ayat 3 UUD 45 memerintahkan negara berkewajiban menyediakan jalan umum yang layak,” papar anggota komisi yang membidaangi perhubungan dari Fraksi PPP. (as)

Foto: Odjie/Parle.



Nurdin Tambubolon (F-Hanura) dan Irna Narulita (F-PPP) menyerahkan Pandangan Fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna, Jumat (12/7). Foto: Iwan Armanias/Parle.



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima delegasi Sekretariat Parlemen Timor Leste di Ruang Rapat Sekjen, Kamis (18/7). Foto: Odjie/Parle.



Tim kunjungan lapangan (kunlap) Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI dipimpin Daryatmo Mardiyanto meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah - Rembang di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. (9/7) Foto:RY/Parle.